

Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau di Kampung Suak Lanjut Kabupaten Siak

Vini Siti Zatra¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: vinisiti2531@student.unri.ac.id¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penerapan transfer fiskal ekologis sering kali mengalami ketimpangan antara keberhasilan infrastruktur fisik dengan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau (BKK-ISH) di Kampung Suak Lanjut, Kabupaten Siak, menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pisau analisis teori Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini sukses besar pada sektor pembangunan fisik lingkungan dan sanitasi karena kepatuhan administrasi yang baik. Namun, program pemberdayaan ekonomi seperti kerajinan lidi sawit dan hidroponik gagal berkelanjutan akibat minimnya pendampingan, keterbatasan waktu peserta, dan lemahnya akses pasar. Disimpulkan bahwa kemajuan fisik lingkungan bergerak jauh lebih cepat daripada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Disarankan agar pemerintah kampung memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil, selektif terhadap komitmen peserta, serta menyediakan pendampingan teknis yang konsisten.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Keuangan Khusus, Siak Hijau, Lingkungan Hidup, Ekonomi Masyarakat

Abstract

The implementation of ecological fiscal transfers often faces a gap between successful physical infrastructure development and the sustainability of local economic empowerment. This study aims to evaluate the implementation of the Special Financial Assistance for Green Siak Incentive (BKK-ISH) program in Suak Lanjut Village, Siak Regency, utilizing a qualitative case study method analyzed through Merilee S. Grindle's policy implementation theory. The results reveal that the program achieved significant success in environmental infrastructure and sanitation due to strong administrative compliance. However, economic empowerment initiatives, such as palm frond crafts and hydroponics, failed to sustain due to a lack of continuous mentoring, participants' time constraints, and poor market access. The study concludes that physical environmental progress advances much faster than community economic capacity building. It is recommended that the village government strengthen needs-based planning, tighten participant commitment selection, and provide consistent technical assistance.

Keywords: Policy Implementation, Special Financial Assistance, Green Siak, Environment, Community Economy.

LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030, khususnya dalam menjaga ekosistem daratan melalui SDG 15 yang menekankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian alam (Laurensia, 2022). Urgensi pelestarian ini semakin menguat mengingat maraknya bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia akibat dominasi aktivitas manusia yang merusak daya dukung ekologi (Fauzan, 2020). Sebagai solusinya, penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) dinilai sangat tepat bagi Indonesia yang memiliki status mega biodiversity guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tanpa mengorbankan kelestarian alam (Kristianto, 2020). Konsep ini bersinergi dengan empat pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan (Haryanto, 2015). Guna merealisasikannya, pemerintah mengadopsi mekanisme Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal ekologis, yaitu kebijakan insentif pendanaan yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup (Anto et al., 2024; Maretaniandini & Ni'mah, 2025). Di tingkat regional, skema transfer fiskal ini diadopsi progresif melalui Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk mendorong keterlibatan pemerintahan tingkat bawah dan masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Kabupaten Siak di Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang secara progresif mengimplementasikan skema TAKE ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau. Sebagai langkah konkret operasional, skema ini diturunkan melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2024. Kebijakan ini mengalokasikan stimulus fiskal kepada pemerintah kampung yang berhasil meraih nilai Indeks Kampung Hijau (IKH) tinggi melalui program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau (BKK-ISH).

Salah satu wilayah yang menerima alokasi anggaran terbesar dan mencatatkan nilai IKH tinggi secara berturut-turut pada tahun 2023 dan 2024 adalah Kampung Suak Lanjut. Namun, alokasi pendanaan yang besar tersebut memunculkan kontras di lapangan. Implementasi BKK-ISH di Kampung Suak Lanjut menghadapi ketimpangan (gap) yang signifikan; program ini mencatatkan kesuksesan besar pada pengadaan infrastruktur fisik lingkungan dan sanitasi, namun gagal mempertahankan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti budidaya hidroponik dan pelatihan kerajinan lidi sawit.

Secara teoritis, keberhasilan atau kegagalan fenomena ini dapat dibedah menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks

implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang disediakan.

Sementara itu, konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Teori ini menekankan bahwa ketersediaan sumber daya anggaran yang besar tidak secara otomatis menjamin keberhasilan program apabila tidak dibarengi dengan kesiapan kondisi kelompok sasaran, ketepatan manajemen pendampingan, serta responsivitas kelembagaan dalam menerjemahkan isi kebijakan ke dalam realitas budaya masyarakat lokal (Pramono, 2020).

Berdasarkan latar belakang ekologis dan adanya kesenjangan empiris tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau (BKK-ISH) di Kampung Suak Lanjut dilaksanakan?
2. Apa saja faktor struktural dan faktor non-struktural yang memengaruhi proses implementasi program tersebut?

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam proses implementasi kebijakan BKK-ISH di tingkat mikro pemerintahan kampung serta menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat keberlanjutannya dengan menggunakan pisau analisis teori Merilee S. Grindle.

Melalui analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi administrasi publik serta masukan praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penyaluran dana transfer fiskal ekologis yang seimbang antara pembangunan fisik lingkungan dan pemberdayaan kapasitas ekonomi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara mendalam, mendetail, dan komprehensif. Tipe penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk membedah secara nyata proses pelaksanaan kebijakan publik di tingkat mikro pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Suak Lanjut, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan memfokuskan amatan pada pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau (BKK-ISH) berdasarkan kerangka regulasi Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2024.

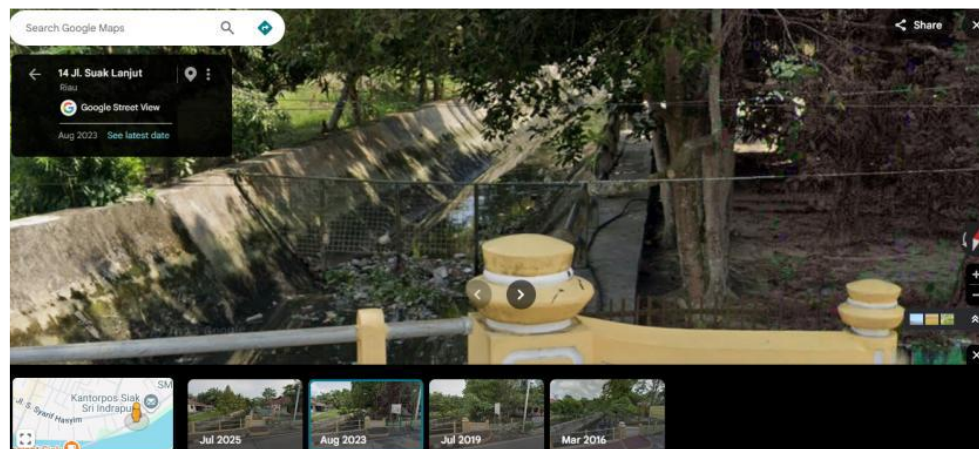
Subjek penelitian atau informan dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), yang mengarah pada aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam kebijakan. Informan tersebut meliputi unsur birokrasi pemerintahan kampung (seperti Kerani Kampung) selaku pelaksana, serta kelompok masyarakat sasaran program yang mencakup Kelompok Tani Hidroponik, Kelompok Tani Mekarjaya, dan peserta pelatihan kerajinan lidi sawit. Sejalan dengan sifat penelitian kualitatif, penelitian ini tidak menggunakan variabel statistik yang diukur dengan angka, melainkan menggunakan fokus penelitian berupa konsep operasional yang diturunkan dari variabel teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Fokus tersebut mencakup enam elemen isi kebijakan (content of policy) dan tiga elemen konteks implementasi (context of implementation). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yang mengombinasikan wawancara mendalam (in-depth interview) secara langsung bersama para informan, observasi lapangan terhadap pemanfaatan aset fisik dan jalannya pemberdayaan, serta dokumentasi yuridis maupun empiris terkait laporan keuangan dan operasional BKK-ISH.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang merujuk pada acuan Miles dan Huberman (1992). Model statistik dan rumus-rumus rumit dihindari sepenuhnya, di mana proses analisis difokuskan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Insentif Siak Hijau (BKK-ISH) di Kampung Suak Lanjut menunjukkan capaian yang kontras antara pembangunan infrastruktur fisik dengan program pemberdayaan masyarakat. Dari aspek administratif dan pemenuhan sarana fisik, program ini dinilai berhasil karena didukung oleh pembagian anggaran yang tertib serta tingkat kepatuhan perangkat kampung yang tinggi terhadap peraturan daerah.



Gambar Kondisi Salah Satu Drainase Sebelum dilakukan Sanitasi
Sumber: Google Map

Keberhasilan tersebut terlihat pada realisasi program pelestarian lingkungan seperti normalisasi saluran air dan pengadaan sarana kebersihan. Sebelum pelaksanaan program sanitasi dilakukan, kondisi lingkungan mengalami kendala kebersihan yang memerlukan penanganan segera.

Dalam pelaksanaannya, program ini menitikberatkan anggaran pada beberapa sektor utama guna mendukung keberlanjutan lingkungan hidup skala lokal. Distribusi fasilitas kebersihan didistribusikan secara terperinci guna mengoptimalkan pemilahan sampah di area publik.

Tabel Lokasi 15 Unit Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 5 Warna

No.	Lokasi	Jumlah Unit
1	Kantor Kampung Suak Lanjut	1 Unit
2	Gedung Serbaguna	1 Unit
3	Gedung Perpustakaan Kampung	1 Unit
4	Gedung PKK	1 Unit
5	Paud Mutiara Hati	1 Unit
6	Musholla Al Amanah	1 Unit
7	Pustu Suak Lanjut	1 Unit
8	Gedung Bapekam	1 Unit
9	MDA Nurul Huda Suak Lanjut	1 Unit
10	TK Sakinah Suak Lanjut	1 Unit
11	Posyandu Nusa Indah I	1 Unit
12	Posyandu Nusa Indah II	1 Unit
13	Musholla Raudatussalam	1 Unit
14	Masjid Syuhada	1 Unit
15	Masjid Salamatul Ummah	1 Unit

Sumber: Pemerintah Kampung Suak Lanjut

Untuk mendukung operasional pengelolaan sampah yang lebih masif, pemerintah kampung menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS) 5 warna, serta pengadaan armada angkut roda tiga. Selain penataan lingkungan, alokasi dana juga diarahkan pada sektor produktif masyarakat melalui pengadaan barang penunjang pertanian.

Meskipun pembangunan fasilitas fisik dan pengadaan material berjalan lancar karena didukung tata kelola birokrasi yang baik, program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan kerajinan lidi sawit dan budidaya tanaman hidroponik justru menghadapi hambatan besar.

Faktor kegagalan mendalam pada sektor ekonomi kreatif dan budidaya ini dipicu oleh akumulasi masalah struktural dan non-struktural dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran. Pertama, program pelatihan kerajinan lidi sawit yang diniatkan sebagai mesin ekonomi baru terhenti total akibat durasi pelatihan yang terlalu singkat (hanya 3 hari) serta koordinasi dan komunikasi yang putus di tengah jalan antara pihak pelatih, pemerintah kampung, dan masyarakat.

Peserta hanya menguasai keterampilan dasar membuat piring tanpa memiliki jaminan akses pasar untuk menyerap hasil produksi, serta diperparah oleh kendala geografis Kampung Suak Lanjut yang didominasi permukiman sehingga menyulitkan warga memperoleh pasokan bahan baku lidi sawit. Ketidaksesuaian ini menegaskan lemahnya proses pengambilan keputusan kampung yang kurang menangkap aspirasi berbasis karakteristik wilayah, di mana masyarakat menilai intervensi ekonomi akan jauh lebih berkelanjutan jika diarahkan pada sektor perikanan mengingat posisi kampung yang berbatasan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.

Kedua, kegagalan pada proyek pertanian hidroponik yang menyasar masyarakat ekonomi rendah disebabkan oleh minimnya komitmen kelompok sasaran serta cacatnya pemenuhan fasilitas dari pihak pelaksana. Sejak tahap awal perakitan sarana di lapangan, sebagian besar dari 10 anggota kelompok tani sudah menunjukkan rendahnya antusiasme karena memiliki kesibukan atau pekerjaan utama lain, sehingga mengabaikan perawatan berkala dan langsung menyerah saat menghadapi kegagalan panen pertama.

Kondisi ini diperburuk oleh kelalaian pelaksana yang memberikan paket logistik tidak standar, seperti tidak adanya komponen vital berupa cup hidroponik resmi yang kemudian dipaksa diganti menggunakan gelas plastik bekas minuman yang dilubangi secara manual. Ukuran gelas bekas yang terlalu besar membuat media tanam busa yang sudah dipotong kecil menjadi longgar, memicu kesalahan teknis pertumbuhan vegetasi, dan berujung pada kegagalan panen massal.

Ketiga, runtuhnya keberlanjutan kedua program ekonomi ini berakar pada absennya fungsi pengawasan dan pendampingan pasca-penyerahan bantuan oleh tim pelaksana Kampung Suak Lanjut. Meskipun aparat kampung mengklaim telah melakukan monitoring berkala, pengakuan objektif dari para ketua dan anggota kelompok tani justru mengungkap bahwa kunjungan lapangan hanya dilakukan satu kali dan bersifat tebang pilih, hanya berpusat di kediaman ketua kelompok tanpa menjangkau rumah anggota lainnya secara adil.

Tanpa adanya transfer pengetahuan dari tenaga ahli teknis seperti agronomi maupun pendamping pemasaran, seluruh modal finansial yang besar dan material yang dianggarkan dalam BKK-ISH gagal bertransformasi menjadi sumber pendapatan tetap. Implementasi kebijakan pada akhirnya terjebak pada pemenuhan output laporan birokrasi dan serah terima materi di atas kertas semata, tanpa menyentuh esensi peningkatan kapasitas manusia yang mandiri.

Pelaksanaan program didukung oleh landasan regulasi pedoman teknis yang jelas dari pemerintah kabupaten, kepatuhan administratif aparat desa yang tinggi, pembagian kerja yang terstruktur, serta ketersediaan pagu anggaran yang memadai untuk melakukan pengadaan barang dan penunjang sarana fisik. Manifestasi faktor struktural ini berjalan sangat efektif dalam mempercepat penyerahan aset-aset material seperti fasilitas kebersihan dan alat pertanian.

Sebaliknya, pada dimensi non-struktural, terdapat dua kondisi yang saling bertolak belakang antara sektor lingkungan dan sektor ekonomi. Keberhasilan non-struktural pada penataan lingkungan digerakkan oleh tingginya komitmen dan kesadaran kolektif warga dalam menjaga kebersihan, yang dibuktikan melalui rutinitas kegiatan gotong royong bulanan, kepatuhan mematuhi plang edukasi, serta kepedulian bersama dalam merawat kebersihan drainase pemukiman. Namun, potensi keberlanjutan lingkungan ini belum sepenuhnya sempurna karena praktik pemilahan sampah di area TPS belum konsisten menjadi kebiasaan harian warga.

Di sisi lain, kegagalan non-struktural pada sektor pemberdayaan ekonomi justru dipicu oleh rendahnya fungsi pengawasan teknis pasca-proyek, ketiadaan pendampingan lapangan dari pemerintah kampung, durasi pelatihan yang terlalu singkat, serta minimnya antusiasme internal kelompok sasaran akibat keterbatasan waktu karena kesibukan kerja utama lain.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan BKK-ISH di Kampung Suak Lanjut baru memberikan dampak signifikan pada perbaikan fasilitas fisik lingkungan, namun belum mampu menggerakkan kemandirian ekonomi masyarakat akibat pola kerja pelaksana yang masih berorientasi pada serah terima bantuan materi tanpa pengawasan program yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan BKK-ISH di Kampung Suak Lanjut berhasil memenuhi target fisik (sarana lingkungan, sanitasi, alat pertanian) berkat kepatuhan administratif aparatur, kejelasan regulasi, dan kesadaran sosial warga. Namun, program pemberdayaan ekonomi (kerajinan lidi sawit dan hidroponik) gagal mewujudkan kemandirian ekonomi. Penyebabnya adalah lemahnya pengawasan pasca-program, pelatihan terlalu singkat, keterbatasan komitmen waktu, cacat logistik wadah tanam, serta musyawarah yang tidak inklusif sehingga mengabaikan potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, H. (2025). Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Implementasi Kebijakan Publik).
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Berkelanjutan Pembangunan Di Indonesia. Unpad Press.
- Anggara, S. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 Di Kecamatan Pineleng. *Governance*, 1(2).
- Fajrin, R. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Ecological Fiscal Transfer Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. A. G. S., Zonyfar, C., Nuraini, R., Purnia, D. S., Setyawati, I., Evi, T., Permana, S. D. H., & Sumartiningsih, M. S. (2022). Metodologi Penelitian. In Suparyanto Dan Rosad (2015).
- Firdaus, F., Patriani, I., & Nafi'ah, B. A. (2025). Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologis Melalui Reformulasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kubu Raya. 15(03), 311–320.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Haryanto, J. T. (2015). Studi Ecological Fiscal Transfer Sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan Di Daerah. 18, 252–266.
- Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Rahman, A., & Satispi, E. (2024). Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Di Kalimantan Utara. 2(1).
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. 2(1).
- Laary, Y., Tulusan, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120).

- Laurensia, P. (2022). Implementasi Sustainable Development Goals 15 Life On Land Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Maretaniandini, S. T., & Ni'mah, Z. (2025). Tinjauan Best-Practice Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) Di Indonesia : Sebuah Systematic Literature Review. 9(1), 1–17.
- Nugraha, R. P., Fauzi, A., & Ekayan, M. (2019). Analisis Kerugian Ekonomi Pada Lahan Gambut Di Kecamatan Pusako, Dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. *Journal Of Agriculture, Resource And Environmental Economics*, 2(2), 1–14.
- Pasolong, H. (2020). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
- Purna, Z. A. (2025). Model Implementasi Kebijakan (Penggunaannya Dalam Penelitian).
- Riandini, N. S., Izzatusholekha, & Tanjung, N. F. (2025). Inisiatif Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kebijakan Ekologi Di Sulawesi Selatan. 5(2).
- Saharjo, B. H., & Fauzan, M. Al. (2020). Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Pulau Rupat, Riau.
- Siak, P. K. (2025). Siak Dalam Angka 2025. Xx.
- Sinambela, L. P. (2023). Metodologi Penelitian Kuantitatif.
- Suastini, N. L. P., Artayasa, I. M., & Martini, S. (2025). Transformasi Fiskal Dalam Mendorong Pembangunan Kota Berbasis Lingkungan Dan Sosial Di Kota Denpasar. 116–134.
- Website
- Bappenas. (N.D.). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sdgs Tujuan 15: Menjaga Ekosistem Darat. Diambil Dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-15/>
- Cakaplah. (2024). Penerima BKK Siak Kabupaten Hijau Meningkatkan, Anggaran Capai Rp12,6 Miliar. Diambil Dari <https://www.cakaplah.com/>
- Jikalahari. (2023). Evaluasi Kebijakan Siak Kabupaten Hijau: Catatan Kritis Terhadap Implementasi Perda Siak Kabupaten Hijau. Diambil Dari <https://jikalahari.or.id/>
- Media, K. C. (2021). Kerajaan Siak: Silsilah Raja, Puncak Kejayaan, Dan Peninggalan. Retrieved From <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/18/150000379/kerajaan-siak-silsilah-raja-puncak-kejayaan-dan-peninggalan>